

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan terlihat dari pencapaian target indikator kinerja kegiatan dan program.

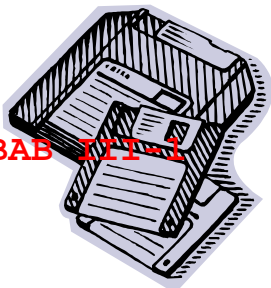
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Blora telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan berdasar pengukuran capaian kinerja Bappeda Blora dapat disimpulkan bahwa seluruh tingkat capaian indikator kinerja telah memenuhi target yang diharapkan dengan hampir rata-rata mencapai 100%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian Bappeda Kabupaten Blora dinilai baik.

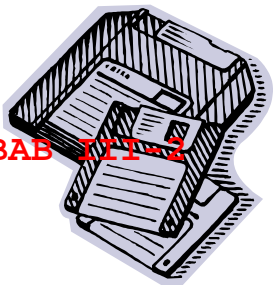
Adapun hasil pencapaian Kinerja pada setiap sasaran di Bappeda Kabupaten Blora dijabarkan sebagai berikut :



**Sasaran Strategis : Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPD maupun pemerintah pusat dan provinsi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang terukur**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA
Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPD maupun pemerintah pusat dan provinsi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang terukur.	1. Keselarasan Kegiatan APBD dengan Kegiatan RKPD	100 %	89,5%	89,5%	61.82%
	2. terlaksananya musyawarah pembangunan mulai tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100 %
	3. Tersusunnya dokumen RKPD yang memiliki Tujuan, Target dan Sasaran yang jelas dan Terukur dengan tepat waktu serta ada kesesuaian dengan Visi, Misi dan Program Bupati.	2 dokumen	2 dokumen	100%	100 %
	4. Tersusunnya perencanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang.	5 Laporan, 2 dokumen	5 Laporan, 2 dokumen	100%	100%
	5. Tersusunnya perencanaan Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya	14 dokumen, dan 2 laporan	14 dokumen, dan 2 laporan	100%	100 %
	6. tersedianya sumber data dan informasi yang actual dan akurat	2 dokumen	5 dokumen	250 %	100 %
	7. terlaksananya kajian-kajian, penelitian dan survey dalam mendukung perencanaan pembangunan Daerah.	3 dokumen	3 dokumen	166%	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam rangka mencapai Sasaran Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPD maupun pemerintah pusat dan provinsi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang terukur dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja antara lain:



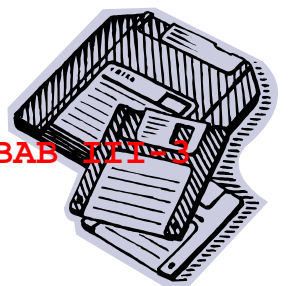
- 1) Persentase Keselarasan Kegiatan APBD dengan Kegiatan RKPD pada Tahun 2016 ditargetkan mencapai capaian 100 % (persen) dimana diharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD Tahun 2016 dapat ditampung semuanya dalam APBD Kabupaten Blora Tahun 2016. Berdasarkan capaian realisasi Tahun 2016 keselarasan kegiatan APBD dengan kegiatan APBD sebesar 89.5 % (persen), hasil capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2015) sebesar 61.82 % (persen).

Jika dilihat skala capaian kinerja maka capaian indikator persentase Keselarasan Kegiatan APBD dengan Kegiatan RKPD pada Tahun 2016 sebesar 89.5 persen termasuk dalam kategori **baik**.

Dari hasil monitoring dan evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2016 didapatkan hasil bahwa seluruh program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2016 telah diakomodir dalam APBD Kabupaten Blora Tahun 2016. Keberhasilan ini tercapai berkat komitmen seluruh SKPD dalam penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD yang telah ditetapkan. Untuk menjaga konsistensi keberhasilan tersebut diperlukan koordinasi dan pendekatan komunikasi yang baik serta proaktif dengan seluruh unsur dan tingkatan.

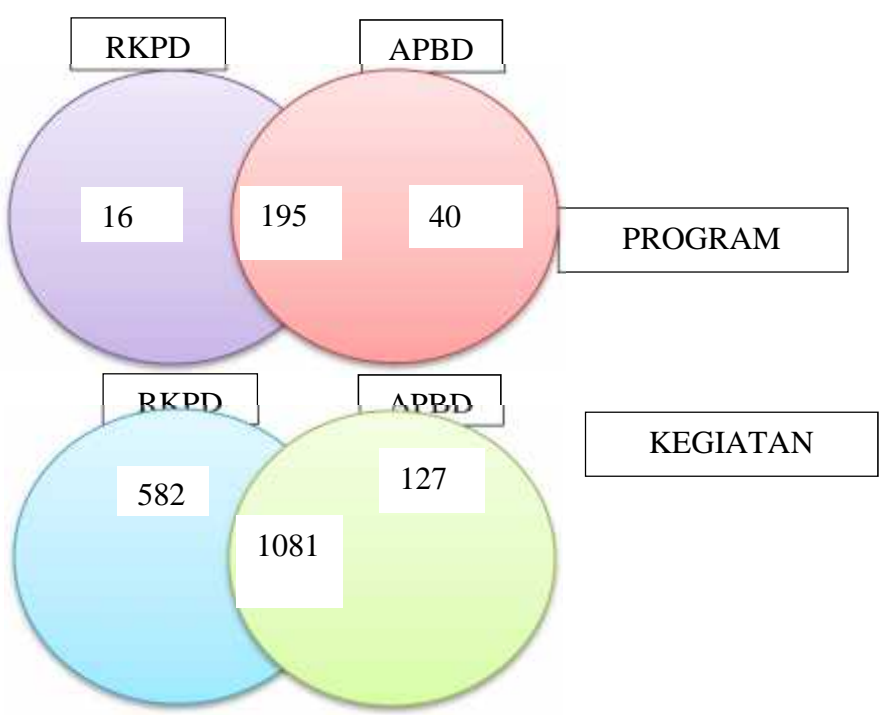
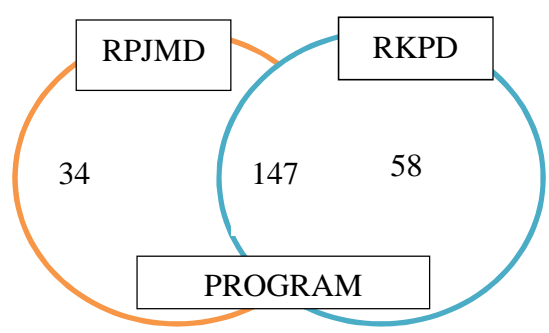
Adapun program dan kegiatan yang tidak ada dalam RKPD akan tetapi ada dalam APBD merupakan program untuk memwadahi kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat/ Provinsi berupa dana DAK/DBHCHT/BANPROV dll. Sedangkan dalam kegiatan ada beberapa Sub kegiatan yang menjadi kegiatan tersendiri, Perubahan nama Kegiatan dan nama Program (Perubahan rekening). Serta Perubahan lokasi kegiatan.

Jumlah Program dalam RKPD ada 205 program dengan 1663 kegiatan, sedangkan jumlah Program dalam APBD 2016 total 235 program dengan 1208 kegiatan kesesuaian RKPD dengan APBD dengan tingkat persentase sebesar

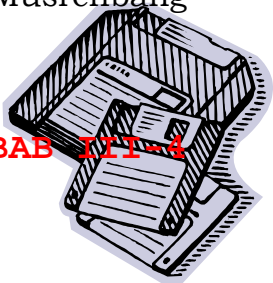


Kesesuaian antar Dokumen :

RPJMD dengan RKPD



2) Capaian indikator Persentase terlaksananya musyawarah pembangunan mulai tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan tepat waktu pada Tahun sebesar 100 % (persen) dimana hasil tersebut sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 100 % (persen). Dilihat skala capaian kinerja maka capaian indikator Persentase terlaksananya musyawarah pembangunan mulai tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan tepat waktu pada Tahun 2016 sebesar 100 persen termasuk dalam kategori **baik**. Bappeda Kabupaten Blora dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan secara terkoordinasi mulai dari Musrenbang Desa, dibawa dalam Forum Musrenbang Kecamatan, selanjutnya dikoordinasikan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Forum SKPD untuk disinergikan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD berdasarkan hasil dari Musrenbang



Kecamatan. Selanjutnya hasil Forum SKPD dibawa ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyempurnaan Rancangan awal RKPD, yang kemudian disempurnakan menjadi rancangan RKPD dan menjadi Perbup. Seluruh proses penyusunan RKPD tersebut telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

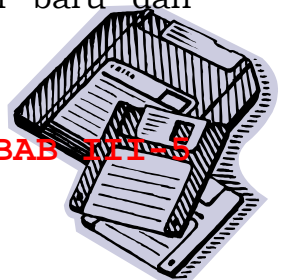
- 3) Indikator tersusunnya dokumen RKPD yang memiliki Tujuan, Target dan Sasaran yang jelas dan Terukur dengan tepat waktu serta ada kesesuaian dengan Visi, Misi dan Program Bupati menargetkan tersusun sebanyak 2 dokumen dan realisasi yang diperoleh sebanyak 2 dokumen.

Dilihat skala capaian kinerja maka capaian indikator Indikator tersusunnya dokumen RKPD yang memiliki Tujuan, Target dan Sasaran yang jelas dan Terukur dengan tepat waktu serta ada kesesuaian dengan Visi, Misi dan Program Bupati pada Tahun 2016 sebesar 100 persen termasuk dalam kategori **baik**.

Dua dokumen yang berhasil oleh Bappeda adalah rancangan RKPD Tahun 2017 yang digunakan sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Blora Tahun 2016 dan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2017 merupakan RKPD tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala daerah pada Tahun 2015 yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011-2031, juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Evaluasi RKPD Kabupaten Blora Tahun 2015. Sesuai tahapan RPJPD, tahun 2017 merupakan tahapan ketiga dari Tahap RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 yang mempunyai visi “ Terwujudnya masyarakat Blora yang maju, sejahtera, adil, damai dan demokratis.”

RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 adalah RKPD masa transisi yang merupakan RKPD tahun pertama masa pemerintahan baru dan



menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilukada Tahun 2015. Dengan adanya pedoman transisi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan guna mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah, dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan bersama.

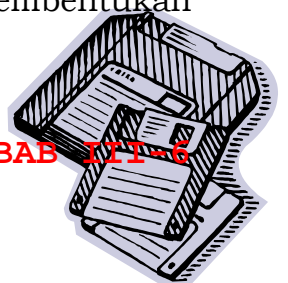
Dokumen RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 juga menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD; landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); serta pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Secara umum tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

- 1) Persiapan penyusunan RKPD;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- 3) Penyusunan Rancangan RKPD;
- 4) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Pra Musrenbang;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD;
- 6) Penetapan RKPD.

Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 dimulai dengan persiapan penyusunan RKPD berupa pembentukan



Tim Penyusun RKPD, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017, mencakup berbagai aktivitas antara lain :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah;
- d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2015 ;
- e) Telaah kebijakan Pemerintah;
- f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Blora;
- g) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
- i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif;
- j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif;
- k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan
- l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif.

Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan RKPD yang pada intinya menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan masukan dan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan harmonisasi serta sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2017. Setelah rancangan RKPD tersusun selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang RKPD Tahun 2016, sebagai wahana perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil Musrenbang, kemudian dirumuskan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 dan langkah selanjutnya adalah penetapan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati Blora.

- 4) Indikator tersusunnya perencanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang ditargetkan tersusun sebanyak 5 laporan dan dua dokumen, terealisasi sebanyak 5 laporan dan 2 (dua) dokumen atau tercapai 100 % (persen), sehingga berdasarkan skala capaian kinerja maka indikator tersusunnya perencanaan pembangunan Sarana dan Prasarana





Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang termasuk dalam kategori **baik**.

- 5) Indikator Tersusunnya perencanaan Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya ditargetkan tersusun sebanyak 14 dokumen dan 2 Laporan, terealisasi sebanyak 14 dokumen dan 2 Laporan atau tercapai 100 % (persen), sehingga berdasarkan skala capaian kinerja maka indikator Tersusunnya perencanaan Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya termasuk dalam kategori **baik**.

Dokumen perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang, Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya yang telah dihasilkan antara lain :

1. dokumen revisi perda RTRW
2. dokumen Desain Masjid Baitunnur Blora
3. dokumen Strategis sanitasi Kabupaten Blora
4. dokumen rencana aksi desa bidang pendidikan (20 desa)
5. Dokumen pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di Blora
6. Dokumen RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah)
7. Data PUS
8. Data Kemiskinan

Laporan kinerja pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang, Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya antara lain:

1. Dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja SKPD output kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan monev dan pelaporan capaian kinerja SKPD
2. pengembangan aplikasi perencanaan(SIPPD)
3. Pengembangan Website Bappeda
4. Aplikasi Profil Daerah
5. Koordinasi pelaksanaan BKPRD
6. Koordinasi pelaksanaan program KHPPIA
7. Laporan pengawasan peredaran GAKY
8. Laporan koordinasi pokja TKPK dengan output tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan dan capaian MDGs





9. Penguatan Klaster FEDEP
10. Pengutan kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif dengan sasaran 8 DI

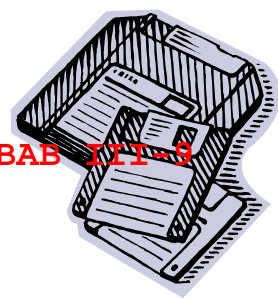
- 6) Indikator tersedianya sumber data dan informasi yang aktual dan akurat ditargetkan tersusun sebanyak 2 dokumen terealisasi sebanyak 5 dokumen atau tercapai 250 % (persen), sehingga berdasarkan skala capaian kinerja maka indikator tersedianya sumber data dan informasi yang aktual dan akurat termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Dokumen yang berhasil disusun oleh Bappeda terkait Data dan Informasi yang aktual antara lain :

- a) Blora Dalam Angka
  - b) Buku Profil Daerah
  - c) Analisis Kesejahteraan Petani
  - d) Buku Indikator Ekonomi Daerah
  - e) Dokumen Indikator Pembangunan Masyarakat
- 7) Indikator terlaksananya kajian-kajian, penelitian dan survey dalam mendukung perencanaan pembangunan Daerah ditargetkan tersusun sebanyak 3 dokumen terealisasi sebanyak 5 dokumen atau tercapai 166 % (persen), sehingga berdasarkan skala capaian kinerja maka indikator terlaksananya kajian-kajian, penelitian dan survey dalam mendukung perencanaan pembangunan Daerah termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Hasil-hasil Penelitian dan Kajian di Kabupaten Blora pada tahun 2016 antara lain :

1. Dokumen produksi Unggulan Daerah
2. Dokumen kajian Difabel
3. Dokumen Kajian NSDA (Neraca Sumber Daya Alam)
4. Dokumen Roadmap Sida Kabupaten Blora
5. Hasil Kerjasama penelitian dengan lembaga / perguruan tinggi di Kabupaten Blora dengan 5 judul penelitian antara lain :
  - a. Studi Pengembangan Pendidikan Efektifitas Ekstrak daun Pepaya terhadap Peningkatan Protein dan produksi ASI pada Ibu Menyusui



- b. Studi Pengembangan Pendidikan Menengah Universal Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Kabupaten Blora
- c. Penelitian Efek Alkohol dan Ekstrak Rumput Teki (*Cyperus Rotundus*) terhadap tingkat Kecerdasan dan Jumlah Sel Piramida Hippocampus
- d. Penelitian Kesenian Barong dan Tayub di Kabupaten Blora, Eksistensi di Lokal dan Ekspansi ke Global
- e. Penelitian Analisis Pembentukan “Village KnowledgeCentre” Berbasis Teknologi Informasi pada Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

6. Pelaksanaan Hasil Lomba Kreanova

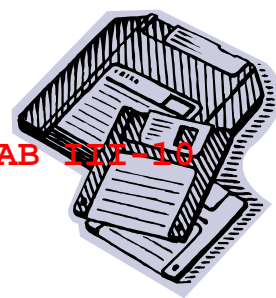
Disamping itu Bappeda juga berhasil menyusun laporan kinerja Bappeda Tahun 2016 antara lain : :

- a. Dokumen LAKIP, Ikhtisar LKPJ, ikhtisar LPPD
- b. Monev Bappeda output kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- c. Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun.

**SASARAN STRATEGIS : peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMD 2010 – 2015 dan RKPD 2010 s/d 2015**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN TAHUN SEBELUM NYA
Peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMD 2010 – 2015 dan RKPD 2010 s/d 2015	Prosentase dokumen statistik daerah sesuai dengan Kebutuhan perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %

Dalam rangka mencapai sasaran Peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMD 2010 – 2015 dan RKPD 2010 s/d 2015 dengan Indikator Prosentase dokumen statistik daerah sesuai dengan Kebutuhan perencanaan pembangunan ditargetkan sebesar 100 % (persen) terealisasi sebanyak 100 % (persen), sehingga berdasarkan skala capaian kinerja maka indikator Prosentase dokumen statistik daerah sesuai



dengan Kebutuhan perencanaan pembangunan termasuk dalam kategori **baik**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005 – 2025. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPD, karena selain mendukung kelancaran penyusunan juga menentukan kualitas dokumen RKPD yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

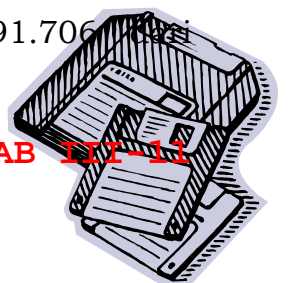
Data-data tersebut kemudian dijadikan salah satu acuan dalam menentukan isu strategis dan prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan.

Hasil pengumpulan data tersebut selain disajikan dan digunakan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan juga berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan maka diperlukan adanya alat yang dapat membantu memberikan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan disajikan dalam buku yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dalam penyusunan buku data dan statistik tersebut Bappeda selalu bekerjasama dengan Instansi Vertikal yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora antara lain PDRB Kabupaten Blora, Blora dalam Angka, Profil Daerah, dll.

## **B. Realisasi Anggaran**

Dari aspek keuangan semua kegiatan yang ada di Bappeda selama Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. Segala pengeluaran telah disesuaikan dengan standar biaya yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau standar lain yang mungkin dapat dipergunakan.

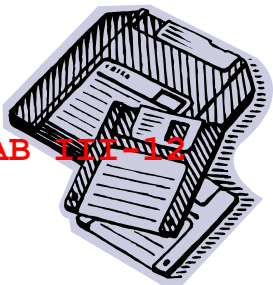
Untuk pos pendapatan nihil karena Bappeda bukan SKPD pengelola pendapatan. Pos Belanja pegawai terealisasi Rp 4.432.391.706,00



anggaran sebesar Rp 4.596.647.000 atau sebesar 96,43 % dari anggaran. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp 5.298.107.277 dari anggaran sebesar Rp 5.640.287.000 atau sebesar 93,93 % dari anggaran. Belanja modal terealisasi sebesar Rp. 335.550.200 dari anggaran sebesar Rp.351.066.000 atau sebesar 95,98 % dari anggaran

Pos Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 298.813.500 dari anggaran sebesar Rp 313.766.000 atau 95,23 % dari anggaran. Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 25.756.600 dari anggaran Rp. 26.000.000 atau 99,06 % dari anggaran. Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 7.473.100 dari anggaran sebesar Rp. 7.550.000 atau sebesar 98,98 % dari anggaran. Belanja aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp 3.507.000 dari anggaran Rp 3.750.000 atau sebesar 93,52 % dari anggaran. Adapun rincian realisasi keuangan kinerja untuk masing-masing program dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPD maupun pemerintah pusat dan provinsi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang terukur</b>	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 934.000.000	Rp.911.031.195	97,54
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.405.000.000	Rp.1.341.214.273	95,46
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	Rp 465.500.000	Rp. 428.226.263	91,99
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan Besar	Rp 83,500,000	Rp.70.799.879	84,79
	Program Perencanaan prasarana Wilayah dan SDA	Rp 141,000,000	Rp. 121.176.094	85,94
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 272.500.000	Rp. 264.615.226	97,10
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Rp 497.000.000	Rp.460.964.479	92,74



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%)
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Rp 795.000.000	Rp.769.446.366	96,78
	Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah	Rp 325.255.000	Rp.314.660.250	96,74
	Program Bidang Perencanaan Pembangunan bersumber dari pemerintah Provinsi serta Pendampingannya	Rp 1.045.500.000	Rp. 969.208.523	92,70
	Program Bidang Perencanaan Pembangunan bersumber dari pemerintah Pusat beserta pendampingannya	Rp 150,000,000	Rp.130.766.198	87,17

Untuk mengukur efisiensi kinerja Bappeda Kabupaten Blora dengan menganalisis jumlah masukan dari target, realisasi pengeluaran/masukan sesuai dengan targetnya atau realisasi melampaui target. Sedangkan untuk mengukur efektifitas dapat dilihat dari tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil.

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2016, Total rata-rata penyerapan anggaran pada Bappeda Kabupaten Blora pada Tahun anggaran 2016 sebesar 95,07 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2016 Bappeda Kabupaten Blora tidak mengalami kendala yang berarti dan capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan serta total realisasi anggaran hampir sepenuhnya terserap.

